

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENGETAHUAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP
KEPATUHAN DAN PENGGUNAAN E-FILING WAJIB
PAJAK PEGAWAI STIE PERBANAS SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Strata Satu
Jurusan Akuntansi



Oleh :

DIAN ANGGRAINI PUSPITASARI
NIM : 2010310756

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2014**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dian Anggraini Puspitasari
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Agustus 1992
N.I.M : 2010310756
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Perpajakan
Judul : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Pengetahuan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Kepatuhan dan Penggunaan *E-filing* Wajib Pajak Pegawai STIE Perbanas Surabaya.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal:



(Supriyati, SE., Ak., M.Si)

Ketua Program Studi S1 Akuntansi,
Tanggal:



(Supriyati, SE., Ak., M.Si)

**THE INFLUENCE OF TAXATION KNOWLEDGE AND INCOME TAX
REPORTING IN ARTICLE 21 KNOWLEDGE ON COMPLIANCE AND
THE USE OF E- FILING REQUIRED TAX OFFICER OF
STIE PERBANAS SURABAYA**

**Dian Anggraini Puspitasari
Surabaya STIE Perbanas**

E-mail: 2010310756@students.Perbanas.ac.id

Jl. Nginden Semolo No. 34-36 Surabaya

Abstract

National income mostly derived from tax payments made by the Taxpayer. Current tax receipts has very important role in national wellbeing. Modern technological advances provide new innovations to simplify tax reporting procedures by using e-filing, tax reporting no longer complicated and can be done online so there is no excuse from taxpayer for not reporting tax. This study aims to test whether the influence of knowledge of taxation and income tax reporting in article 21 knowledge on compliance and the use of e-filing by taxpayer as the officer of STIE Perbanas Surabaya. Method in this study is a quantitative method using primary data. Researcher using multiple linear regression to test the data collection using a questionnaire to test the hypothesis. Taxpayer as the officers of STIE Perbanas Surabaya who use e-filing is the sample selected by the researcher.

Keywords : *taxation knowledge, income tax reporting in article 21 knowledge, taxpayer compliance, the use of e-filing.*

PENDAHULUAN

Pajak pada mulanya adalah suatu pungutan yang sifatnya pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara dan menjaga kepentingan Negara seperti membayar gaji pegawai, pengadaan jalan umum, dan lain-lain. Saat ini pajak bukanlah merupakan suatu pemberian lagi, namun pajak mencerminkan peran aktif masyarakat dalam meningkatkan penghasilan negara meskipun terdapat unsur paksaan. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat dan pemerintah. Pajak yang diterima oleh negara merupakan penerimaan yang terbesar di antara penerimaan dari sektor lain yang diterima oleh negara, sehingga pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, jika masih banyak Wajib Pajak

yang belum tertib dalam membayar pajak maka secara otomatis pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang maksimal.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan Pajak saat ini berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia, tetapi yang terjadi adalah jumlah penerimaan pajak yang disampaikan masih belum terlalu jelas kebenarannya. Hal ini disebabkan oleh karena Sistem Model Penerimaan Negara yang merupakan suatu sistem informasi di Departemen Keuangan yang mengintegrasikan penerimaan Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea Cukai, serta pengeluaran Direktorat Jenderal Anggaran belum solid (Harry, 2010:6).

Pasal 21 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 mengatur mengenai pajak

penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Pajak penghasilan pegawai sendiri merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pegawai yang mendapatkan Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan.

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu kendala utama dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak terhadap pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak negara. Menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan kepada masyarakat dalam membayar pajak sangatlah penting agar target pajak dapat tercapai yakni masyarakat lancar dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari seberapa paham pengetahuan wajib pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, misalnya : mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya (Safri, 2007:56).

Perkembangan era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Sebagai contoh yang sangat terlihat dan kontras yaitu perkembangan di bidang teknologi yang dari tahun ke tahun juga mengalami perkembangan pesat. Kemajuan teknologi modern khususnya bidang elektronika, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Salah satu pengaruh kemajuan teknologi terhadap bidang kearsipan yaitu dengan adanya inovasi baru pada proses

pengarsipan yaitu arsip elektronik. Kelebihan utama dari arsip elektronik tentu saja lebih praktis dan memiliki tingkat risiko yang lebih kecil. Mengantisipasi perkembangan informasi dan teknologi tersebut, Dirjen Pajak berusaha untuk memenuhi aspirasi Wajib Pajak (WP) dengan mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak tersebut tidak lain adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan, khususnya administrasi perpajakan. Modernisasi pajak ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan (Harry, 2010:22).

Secara umum, *e-filing* melalui situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang beralamatkan di www.pajak.go.id, adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Asuransi dan Teori Kewajiban Mutlak

Teori Asuransi berdasarkan pada paham bahwa negara berhak memungut pajak karena negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingan, keselamatan, dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Teori asuransi ini bila dikaitkan dengan imbalan yang dikaitkan dengan pemerintah tidak sama dengan imbalan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Imbalan yang diberikan pemerintah bersifat menyeluruh tidak

sekedar kepada masyarakat pembayar pajak saja (Harry, 2010:11).

Teori kewajiban mutlak atau Teori bakti muncul menyatakan bahwa dalam penyelenggaraannya, negara lahir dari persekutuan individu-individu secara mutlak memiliki kewenangan di segala bidang dengan memperhatikan syarat keadilan, termasuk dalam hal pemungutan pajak dari individu-individu tersebut. Di lain pihak individu-individu tersebut secara mutlak memiliki kewajiban untuk tunduk terhadap kewenangan negara (Harry, 2010:11). Negara diwakili oleh pemerintah berhak memungut pajak pada rakyat agar dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut dikarenakan pemasukkan yang diperoleh pemerintah didominasi dari penerimaan kas yang berasal dari penarikan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan dan penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai.

Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Unsur-unsur pokok yang dapat diambil dari definisi pajak di atas adalah iuran atau pungutan, dipungut berdasar undang-undang, pajak dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi dan digunakan untuk keperluan umum.

Fungsi pajak menurut Harry (2010:15) ada empat fungsi pajak yang biasa disebut dengan *the four R* yang mengacu pada fungsi pajak yang dipungut oleh negara,

yaitu *Revenue* (penerimaan), *Redistribution* (Pemerataan), *Repricing* (Pengaturan Harga), *Representation* (Legalitas Pemerintahan).

Sistem pemungutan pajak menurut Erly (2011:20) terdapat empat unsur *Official Assesment*, *Self Assesment System*, *Full Self Assesment System* dan *Semi Full Self Assesment System*. yaitu *Official Assesment System* yaitu suatu sistem pungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparat pajak, *Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada WP, *Full Self Assesment System* yaitu suatu sistem perpajakan di mana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh wajib pajak berada pada wajib pajak itu sendiri dalam menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri pajaknya, dan *Semi Full Self Assesment System* yaitu sistem pemungutan pajak campuran antara *self assesment* dan *official assesment*.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak sangatlah penting dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan. Secara teoritis, untuk mewujudkan dan mengembangkan sikap positif tentang suatu hal harus dimulai dari adanya pengetahuan hal tersebut, dalam hal ini adalah pengetahuan mengenai pajak.

Pemerintah telah melakukan banyak langkah untuk menambah pengetahuan tentang pajak kepada wajib pajak, seperti halnya melalui sosialisasi perpajakan yang dituangkan melalui seminar, penyuluhan, spanduk-spanduk, dan melalui baik media massa maupun media elektronik. Pemerintah melakukan itu semua bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memahami dan mengetahui

perpajakan serta agar lebih memudahkan wajib pajak mendapatkan informasi tentang perkembangan pajak di Indonesia.

Informasi tentang perpajakan dapat didapat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun informal. Pendidikan formal dapat dilakukan melalui pendidikan perpajakan untuk sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sedangkan pendidikan informal dapat diperoleh melalui lingkungan keluarga, rukun tetangga, maupun kelurahan. Pendidikan perpajakan dapat diperoleh dari media massa dan media elektronik seperti koran, majalah, televisi maupun radio.

Pengetahuan Pajak Penghasilan 21

Pajak Penghasilan pasal 21 Undang – Undang No. 36 tahun 2008 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Setiap orang yang bekerja tentu saja akan mendapatkan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Demikian juga dengan karyawan yang bekerja pada sebuah perusahaan, tentunya akan mendapatkan penghasilan yang biasanya disebut gaji. Maka atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pemerintah akan menarik pajak dari penghasilan karyawan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Soemarso, 2007: 67). Kepatuhan wajib

pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan wajib pajak formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara formal sesuai ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan (contoh: menyampaikan SPT tepat waktu). Sedangkan, kepatuhan material adalah keadaan di mana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan (contoh: mengisi SPT dengan baik dan lengkap). Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan alangkah baiknya tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Sebaiknya kepatuhan akan membayar pajak timbul dari individu masing-masing sebagai tanda rasa bakti kepada negara dan semua itu secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara.

Penggunaan *E-filing*

E-filing adalah sistem pelaporan SPT menggunakan sarana internet tanpa melalui pihak lain dan tanpa biaya apapun, yang dibuat oleh DJP untuk memberikan kemudahan bagi WP dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada DJP secara lebih cepat, dan lebih murah. Dengan *e-filing*, WP tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Lapor SPT Tahunan sekarang ini semakin mudah. Direktorat Jenderal Pajak telah menyiapkan sebuah layanan penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang tentu saja semakin memudahkan wajib pajak untuk melapor, kapan saja, dan dimana saja. Hal ini merupakan salah satu terobosan baru pelaporan SPT yang digulirkan DJP untuk membuat WP semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk saat ini, *e-*

filing melayani penyampaian dua jenis SPT, yaitu SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770S dan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS.

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Perubahan Sikap dapat dijadikan landasan untuk hubungan variabel pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada dasarnya setiap individu terlahir tanpa pengetahuan apapun. Seiring dengan perkembangan yang terjadi, seorang individu menerima berbagai pengetahuan dari berbagai pihak. Informasi pengetahuan tersebut memaksa individu untuk mengubah sikap dan perilaku melalui informasi yang telah diterima termasuk pengetahuan tentang perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yang diterima oleh individu mengenai betapa pentingnya pemasukan pajak yang diterima oleh negara dari para wajib pajak akan mengubah sikap dan perilaku setiap individu wajib pajak. Semakin seseorang mengetahui tentang perpajakan semakin meningkatkan pula tingkat kepatuhan wajib pajak karena semua mengetahui apabila mereka melanggar atau tidak membayar pajak, hal tersebut akan merugikan negara dan elemen yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu, sangat berpengaruh signifikan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hubungan Pengetahuan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Kebutuhan dan Kepuasan yang Sama halnya hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menggunakan teori Perubahan Sikap. Hubungan antara variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan wajib pajak juga dapat dilandasi oleh teori tersebut karena dalam dunia perpajakan

semakin bergulirnya waktu semakin berkembang baik dari sisi peraturan untuk menyesuaikan kebutuhan yang sedang terjadi pada saat ini.

Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan pelayanan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan pajak penghasilan, tetapi jika pada aplikasinya wajib pajak tidak mengetahui sistem administrasi pajak seperti sistem pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang telah berkembang pada saat ini pastinya akan merasa kesulitan dalam penerapan pelaporan pajak penghasilan. Jika wajib pajak telah merasa kesulitan dalam membayar pajak maka akan menimbulkan dampak negatif yaitu wajib pajak cenderung menghindari pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dimiliki wajib pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak..

Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Penggunaan E-Filing

Teori Perubahan Sikap dapat dijadikan landasan untuk hubungan variabel pengetahuan perpajakan dengan penggunaan *e-filing* wajib pajak. Pengetahuan yang diterima oleh setiap individu akan mengubah sikap dan perilaku setiap individu. Pengetahuan individu mengenai perkembangan informasi perpajakan akan mempengaruhi pengetahuan individu mengenai cara dan sistem pelaporan SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online*. Hal tersebut terjadi karena setiap masa sistem administrasi pajak selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan pajak pada saat ini, sehingga wajib pajak diharapkan selalu mengembangkan pengetahuannya dalam dunia perpajakan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada.

Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan pelayanan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan pajak

penghasilan.semakin bergulirnya waktu semakin berkembang baik dari sisi peraturan maupun sistem administrasi perpajakan untuk menyesuaikan kebutuhan yang sedang terjadi pada saat ini.

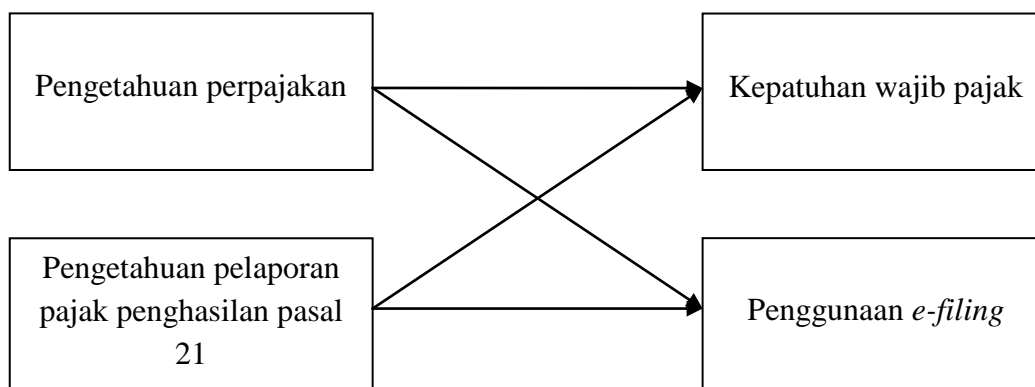
Hubungan Pengetahuan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penggunaan *E-Filing*

Sama halnya hubungan antara variabel pengetahuan perpajakan terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak yang menggunakan teori Perubahan Sikap. Hubungan antara variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak juga dapat dilandasi oleh teori tersebut karena dalam dunia perpajakan semakin bergulirnya waktu semakin berkembang baik dari sisi peraturan untuk

menyesuaikan kebutuhan yang sedang terjadi pada saat ini. Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang dimiliki oleh setiap wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat penggunaan *e-filing* wajib pajak. Hal tersebut terjadi karena setiap masa sistem administrasi pajak selalu berkembang mengikuti perkembangan teknologi maupun kebutuhan pajak.

Pada saat ini, wajib pajak diharapkan selalu mengembangkan pengetahuannya dalam dunia perpajakan agar dapat mengikuti perkembangan yang ada. Adanya perkembangan yang terjadi dapat memudahkan pelayanan pada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar dan melaporkan pajak penghasilan.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁ : Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pegawai
- H₂ : Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pegawai.

H₃ : Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai.

H₄ : Pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap penggunaan *e-filing*

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, hal ini disebabkan uji statistik yang

digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan hubungan antar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini meneliti tentang hubungan pengetahuan pajak, dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21 sebagai variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai sebagai variabel dependen.

Identifikasi Variabel

Variabel bebas (Independent)

- Kepatuhan wajib pajak
- Penggunaan *e-filing* wajib pajak

Variabel Terikat (Dependent)

- Pengetahuan perpajakan
- Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21

Definisi Oprasional dan Pengukuran Variabel

Adapun definisi oprasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan

Adalah wawasan seseorang mengenai konsep pajak yang pengetahuan pajaknya dapat diukur dengan melihat seberapa besarnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang meliputi definisi pajak, manfaat pajak dan manfaat wajib pajak patuh, pemungutan pajak. sistem perpajakan, sanksi pajak dan kepemilikan NPWP.

Pengetahuan Pelaporan Pajak Penghasilan 21

Adalah suatu perubahan dalam berbagai aspek dalam sistem perpajakan agar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Variabel ini dapat diukur dengan melihat seberapa besarnya tingkat pengetahuan wajib pajak yang meliputi definisi pajak penghasilan, pelaporan pajak penghasilan, manfaat pelaporan pajak penghasilan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Adalah seseorang atau badan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak yang taat dalam memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan. Variabel kepatuhan ini dapat diukur dengan melihat kriteria wajib pajak patuh yang telah ditetapkan oleh dirjen pajak.

Penggunaan *E-filing*

Adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak. Variabel kepatuhan ini dapat diukur dengan melihat sejauh mana wajib pajak memahami tata cara penggunaan sistem *e-filing*.

Adapun pengukuran variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skala likert's digunakan untuk pengukuran variabel dalam penelitian ini. Skala likert's merupakan metode skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden atau kelompok orang terhadap pernyataan yang diajukan peneliti (Arfan, 2008: 184). Data dalam kuesioner ini berdasarkan aspek kelaziman tergolong dalam data interval karena dihasilkan dari skala sikap.

Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi atau pegawai STIE Perbanas Surabaya. Peneliti tidak melakukan analisis terhadap seluruh anggota populasi melainkan hanya terhadap sebagian anggota populasi yang terpilih sebagai sample. Peneliti menggunakan pengumpulan informasi dari anggota populasi yang hanya menggunakan sistem *e-filing* dalam melaporkan dan menyampaikan pajak terutang atau disebut dengan kriteria sampling.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan

analisis statistik yang diolah menggunakan software SPSS 17.0.

Analisis deskriptif merupakan analisis yang memberikan gambaran atau penjelasan dari suatu data yang digunakan dalam suatu penelitian. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dan karakteristik dari responden. Deskriptif variabel ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan secara rinci nilai dari tiap variabel yang digunakan serta gambaran karakteristik responden. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independent dan variabel dependent.

Kepatuhan dan penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai merupakan variabel

independent dalam penelitian ini sedangkan pengetahuan perpajakan, dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21 merupakan variabel dependent.

Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 42 sampel. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21 yang dimiliki wajib pajak terhadap kepatuhan, serta pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai. Dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik SPSS versi 17.0 dengan model regresi linier berganda.

Tabel 1
Hasil Pengujian Uji T
Pengaruh Perpajakan Dan Pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh	T hitung	T tabel	Signifikan	Kesimpulan
Pengetahuan perpajakan → Kepatuhan wajib pajak	0,745	2,024	0,461	H ₀ diterima
Pengetahuan pelaporan pph 21 → Kepatuhan wajib pajak	3,092	2,024	0,004	H ₀ ditolak

Keterangan: * $\alpha = 5\%$; $t > 2,024$ signifikan

Tabel 1
Hasil Pengujian Uji T
Pengaruh Perpajakan Dan Pengaruh Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21
Terhadap Penggunaan E-Filing

Pengaruh	T hitung	T tabel	Signifikan	Kesimpulan
Pengetahuan perpajakan → Penggunaan <i>e-filing</i>	0,275	2,024	0,785	H ₀ diterima
Pengetahuan pelaporan pph 21 → Penggunaan <i>e-filing</i>	2,450	2,024	0,019	H ₀ ditolak

Keterangan: * $\alpha = 5\%$; $t > 2,024$ signifikan

Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan, Penyebab tidak adanya pengaruh pada variabel pengetahuan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, karena informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda.

Tingkat pendidikan S1 sebanyak 48% namun, jurusan yang ditempuh responden sebagian besar bukan berasal dari bidang akuntansi dan perpajakan. Faktor lain menurut pengakuan responden yang dapat mempengaruhi variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak signifikan adalah sebagian besar pegawai STIE Perbanas yang mempunyai banyak kesibukan tidak sempat mengikuti pelatihan mengenai perpajakan sehingga kurangnya informasi serta pengetahuan mengenai perpajakan, serta sebagian besar responden dibantu oleh bagian keuangan untuk melaporkan pajak.

Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21 terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa dengan adanya pengetahuan mengenai pelaporan pajak penghasilan 21 yang dimiliki para wajib pajak dapat membantu mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur mengenai pajak penghasilan pegawai, hal ini disebabkan karena para wajib pajak pegawai memahami bahwa setiap penghasilan yang mereka terima seharusnya dilaporkan terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang pajak. Para wajib pajak juga didukung dengan adanya pelatihan mengenai pelaporan pajak penghasilan wajib pajak serta banyak

dibantu oleh bagian keuangan dalam pelaporan pajak penghasilan pasal 21.

Pengetahuan perpajakan terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak

Hasil pengujian menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh tidak signifikan. Lamanya responden menggunakan *e-filing* dapat menjadi faktor utama variabel pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penggunaan *e-filing*, banyak diantaranya menggunakan *e-filing* kurang dari 1 tahun sehingga kurangnya pengetahuan responden mengenai pengetahuan perpajakan dengan menggunakan *e-filing*.

Responden dengan umur diatas 30 tahun banyak yang kurang memahami penggunaan *e-filing*, rata-rata merasa kesulitan melaporkan pajak terutang mereka secara *online* termasuk melaporkan pajak penghasilan 21, banyak diantaranya mengaku tidak mengikuti pelatihan saat diadakannya pelatihan mengenai pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* sehingga mereka yang tidak mengikuti pelatihan merasa kesulitan untuk melaporkan pajak terutang mereka dengan menggunakan *e-filing* karena kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima. Responden yang merasa kesulitan melaporkan pajak terutang dengan menggunakan *e-filing* memilih menggunakan jasa orang lain yang lebih ahli menggunakan *e-filing* untuk melaporkan pajak terutang mereka dengan menggunakan *e-filing*, termasuk melaporkan pajak penghasilan pasal 21.

Pengetahuan pelaporan pajak penghasilan 21 terhadap penggunaan *e-filing* wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak merasa dengan adanya pengetahuan mengenai pelaporan pajak penghasilan 21 yang dimiliki para wajib pajak dapat membantu mendorong wajib

pajak untuk melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan undang-undang yang telah diatur mengenai pajak penghasilan pegawai, hal ini disebabkan karena para wajib pajak pegawai memahami bahwa setiap penghasilan yang mereka terima seharusnya dilaporkan terlebih dahulu sesuai dengan undang-undang pajak.

Munculnya terobosan baru pada perpajakan yaitu dengan menggunakan *e-filing* dapat mempermudah wajib pajak melaporkan pajak penghasilan dan tidak perlu membuang waktu para responden sehingga dapat menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa harus mengantri lama di kantor pelayanan pajak mengingat responden pada penelitian ini adalah dosen serta karyawan STIE Perbanas Surabaya. Didukung dengan adanya pelatihan pegawai STIE Perbanas Surabaya mengenai pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* menambah pengetahuan serta mempermudah responden untuk melaporkan pajak penghasilan dan pajak terutang lainnya dengan menggunakan *e-filing*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 terhadap kepatuhan dan penggunaan *e-filing* wajib pajak pegawai STIE Perbanas Surabaya. Metode dalam penelitian ini merupakan metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Peneliti menggunakan uji regresi linier berganda sehingga dalam pengumpulan datanya menggunakan kuesioner untuk menguji hipotesis. Penelitian ini menggunakan 42 sampel wajib pajak pegawai STIE Perbanas Surabaya yang menggunakan *e-filing*.

Hasil analisis variabel kepatuhan wajib pajak (Y1) baik secara deskriptif maupun secara statistik dengan menggunakan regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) tidak

memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, karena informasi dan pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh setiap individu berbeda-beda. Jurusan yang ditempuh responden sebagian besar bukan berasal dari bidang akuntansi dan perpajakan, sehingga kurangnya informasi dan pengetahuan yang dimiliki responden mengenai perpajakan. Variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan responden yang merupakan pegawai STIE Perbanas Surabaya mengikuti pelatihan mengenai pelaporan pajak penghasilan pasal 21 serta sebagian besar responden mengaku dibantu oleh bagian keuangan untuk melaporkan pajak penghasilan 21 sesuai undang-undang perpajakan.

Pada hasil analisis variabel penggunaan *e-filing* (Y2) baik secara deskriptif maupun secara statistik dengan menggunakan regresi linier berganda dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel penggunaan *e-filing*, karena sebagian besar responden mengaku banyak yang menggunakan *e-filing* kurang dari 1 tahun serta responden juga mengaku tidak mengikuti pelatihan mengenai penggunaan *e-filing* sehingga pengetahuan dan informasi yang diperoleh responden kurang. Responden yang tidak mengikuti pelatihan merasa kesulitan menggunakan *e-filing* sehingga menggunakan jasa orang lain yang lebih ahli untuk melaporkan pajak dengan menggunakan *e-filing*. Variabel pengetahuan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 (X2) memiliki pengaruh terhadap penggunaan *e-filing*. Hal ini disebabkan karena responden yang merupakan wajib pajak pegawai memahami bahwa setiap penghasilan yang diterima seharusnya dilaporkan terlebih dahulu. Munculnya *e-filing* mempermudah responden untuk melaporkan pajak terutang termasuk pajak penghasilan pasal 21 tanpa harus mengantri pada dropbox maupun KPP.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Responden dalam penelitian ini merupakan pegawai STIE Perbanas Surabaya. Hal tersebut menyebabkan terbatasnya responden yang diperoleh dalam penelitian ini.
2. Terdapat banyaknya kuesioner tidak kembali dikarenakan bertepatan dengan dilaksanakannya audit di STIE Perbanas Surabaya sehingga para pegawai sibuk dalam mempersiapkan audit dan tidak sempat untuk mengisi kuesioner.
3. Masih banyak pegawai yang kurang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan dan pengetahuan tentang pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut dikarenakan para pegawai dalam menggunakan *e-filing* mayoritas kurang dari 1 tahun.

Adapun saran dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Pemerintah diharapkan untuk memberikan brosur-brosur dengan gambar dan kalimat ajakan yang menarik wajib pajak mengenai pajak penghasilan 21 dengan tujuan agar wajib pajak pegawai bersedia melaporkan pajak penghasilan tanpa perlu adanya peringatan.
2. Pada penelitian selanjutnya diharapkan responden penelitian tidak hanya pada pegawai STIE Perbanas Surabaya saja tetapi pada pegawai yayasan Perbanas Jawa Timur agar responden yang didapat lebih banyak dari penelitian sebelumnya.
3. Pada penelitian selanjutnya wajib pajak yang terpilih sebagai responden merupakan wajib pajak yang membayar dan melaporkan pajaknya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Arfan Ikhsan. 2008. *Metodologi Penelitian Akuntansi Keprilakuan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Banu Witono. 2008. "Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 7, No.2, hal: 196-208.
- Erly Suandy. 2011. *Hukum Pajak*. Edisi Kelima. Jakarta : Salemba Empat.
- Imam Ghozali. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herry Purwanto. 2010. *Dasar - Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Edisi pertama. Yogyakarta :BPFE Yogyakarta
- Rahmat Alfian. 2012. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Surabaya Krembangan". *Jurnal Perpajakan*. Vol. 3, No.2, hal: 124-137.
- Risal C. Y. Laihad. 2013. "Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-filling Wajib Pajak di Kota Manado". *Jurnal EMBA*. Vol. 1, No.3, hal: 44-51.
- Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang

Dapat Diberikan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan
Pembayaran Pajak.

Republik Indonesia. Keputusan Menteri
Keuangan
No.235/KMK.03/2003 tentang
Penentuan Wajib Pajak Patuh
Merupakan Dasar Hukum
dalam Penetapan Kriteria
Wajib Pajak Patuh.

Republik Indonesia. Undang-undang
No.28 tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan.

Republik Indonesia. Undang-undang
No.38 tahun 2009 tentang
Pajak Penghasilan Pasal 21

Safri Nurmantu. 2007. *Pengantar
Perpajakan*. Edisi Pertama.
Jakarta : Granit.

Sumarsan. 2013. *Perpajakan: Konsep,
Teori, dan Isu*. Edisi Pertama.
Yogyakarta : Graha Ilmu.

Soemarsono S. R. 2007. *Perpajakan
Pendekatan Komprehensif*.
Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*.
Edisi Pertama. Bandung: CV.
Alfabeta.

Supriyati dan Hidayati. 2008. “Pengaruh
Pengetahuan Pajak
penghasilan dan Presepsi
Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak”.
*Jurnal Akuntansi dan
Teknologi Akuntansi*. Vol 7.
No1, hal: 118-128.

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*.
Vol.1. Edisi Kesembilan.
Jakarta : Salemba Empat.